



3.	Lamidi	Jeruk Gulung	2005	Muncul retakan-retakan tanah yang cukup besar di depan rumah
4.	Deni	Jeruk Gulung	2005	Longsor terjadi di bagian belakang rumah tetapi tidak sampai masuk kerumah.
5.	Yatemi	Jeruk Gulung	2005	Muncul retakan-retakan tanah dibelakang rumah
6.	Supani	Jeruk Gulung	2005	Longsor menghantam bagian belakang rumah dan sedikit menghancurkan bagian belakang rumah.
7.	Sipun	Jeruk Gulung	2008	Muncul retakan-retakan kecil di depan rumah
8.	Suprih	Jeruk Gulung	2008	Muncul retakan-retakan di depan rumah
9.	Lamidi	Jeruk Gulung	2010	Muncul retakan-retakan kecil di depan rumah
10.	Yatemi	Jeruk Gulung	2010	Muncul retakan-retakan didepan rumah dan terjadi longsor tebing belakang rumah
11.	Djami	Jeruk Gulung	2016	Terjadi retakan-retakan di dalam rumah
12.	Tumini	Jeruk Gulung	2016	Longsor menimpa bagian samping rumah dan menjadikan dinding rumah retak-retak
13.	Dami	Jeruk Gulung	2016	Longsor menimpa bagian belakang rumah
14.	Minil	Jeruk Gulung	2016	Longsor menimpa bagian depan pekarangan rumah
15.	Katani	Jeruk Gulung	2016	Terjadi retakan-retakan yang cukup besar di depan rumah
16.	Mulyono	Jeruk Gulung	2016	Longsor terjadi dibelakang rumah
17.	Djaman	Jeruk Gulung	2016	Longsor mengakibatkan rumah retak-retak dan tidak layak untuk dihuni
18.	Gito	Jeruk Gulung	2016	Longsor mengakibatkan rumah retak-retak





		menyebarkan ke samping, mengalir), dan mungkin pengaruh-pengaruh sekundernya adalah badai yang kencang, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Tanah longsor lebih menyebar dibandingkan dengan kejadian geologi lainnya.
3.	Bisa diramalkan	Frekuensi kemunculannya, tingkat dan konsekuensi dari tanah longsor bisa diperkirakan dan daerah-daerah yang beresiko tinggi ditetapkan dengan penggunaan informasi pada area geolog, geomorphologi, hidrologi & klimatologi dan vegetasi.
4.	Faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap kerentanan	Tempat tinggal yang dibangun pada lereng yang terjal, tanah yang lembek, puncak batu karang. Tempat hunian yang dibangun pada dasar lereng yang terjal, pada mulut-mulut sungai dari lembah-lembah gunung. Jalan-jalan, jalur-jalur komunikasi di daerah-daerah pegunungan. Bangunan dengan pondasi lemah. Jalur-jalur pipa yang ditanam, pipa-pipa yang mudah patah Kurangnya pemahaman akan bahaya tanah longsor
5.	Pengaruh-pengaruh umum yang merugikan	Kerusakan fisik – Segala sesuatu yang berada diatas atau pada jalur tanah longsor akan menderita kerusakan . Puing-puing bisa menutup jalan-jalan, jalur komunikasi atau jalan-jalan air. Pengaruh-pengaruh tidak langsung bisa mencakup kerugian produktivitas pertanian atau lahan-lahan hutan , banjir, berkurangnya nilai-nilai proverti. Korban – Kematian terjadi karena runtuhnya lereng. Luncuran puing-puing yang hebat atau aliran Lumpur telah membunuh beribu-ribu orang.
6.	Tindakan pengurangan resiko yang memungkinkan	Pemetaan bahaya Legislasi dan peraturan penggunaan bahaya Asuransi
7.	Tindakan kesiapan khusus	Pendidikan komunitas Monitoring. System peringatan dan system evakuasi





sangat rendah. Pemilihan jenis vegetasi yang tepat pada lereng. tidak ada aktifitas penggalian dan pemotongan lereng.

Dari beberapa penjelasan diatas terkait dengan tingkat kerawanan longsor, maka Desa surenlor termasuk dalam kawasan dengan tingkat kerawanan sedang, karena bentuk perbukitan desa Surenlor relatif sama rata, tidak ada yang paling tertinggi maupun yang paling terendah. Hanya di beberapa titik tertentu yang menunjukkan bahwa itu adalah titik yang paling tinggi juga yang paling rendah, dan luasannya juga tidak begitu luas. Hal ini berbeda dengan daerah-daerah di sekitar Desa Surenlor seperti Desa Dompjong dan Desa Sumurup yang sama-sama merupakan daerah yang berada di dataran tinggi yang terdiri dari perbukitan-perbukitan. Tetapi di daerah ini banyak terdapat daerah-daerah tertinggi tidak hanya satu atau dua tempat saja, tetapi ada di beberapa tempat. Sehingga tingkat kerawanan longsornya bisa dibilang tinggi. Selain itu, di daerah-daerah sekitar Desa Surenlor juga lebih sering terjadi tanah gerak. Banyak sekali titik-titik tanah gerak yang ada di desa tersebut. Sedangkan di Desa Surenlor sendiri untuk tanah gerak sangat jarang terjadi. Ada beberapa titik tapi itu hanya pada satu atau dua titik saja.

Berikut gambar topografi Desa Surenlor yang diambil dari ketinggian yang paling bawah hingga pada ketinggian yang paling tertinggi:











Saluran air ini tidak hanya berada pada satu tempat saja, tetapi ada di berbagai tempat. Dan dalam hal ini masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa hal tersebut juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab tanah longsor.

Selain faktor air, faktor kemiringan lereng juga berpengaruh terhadap terjadinya tanah longsor. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PMPU) No.22/PRT/M/2007 dijelaskan bahwa lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsorannya mendatar. Kemiringan lereng mempunyai bobot yang sangat tinggi dalam kerawanan longsor yaitu sebesar 30%. Secara umum tingkat kemiringan lereng yang mencapai 40% atau lebih memiliki sensitivitas tingkat kerawanan yang tinggi, kemiringan lereng yang berkisar antara 21-40% memiliki sensitivitas tingkat kerawanan sedang dan kemiringan lereng dengan tingkat kerawanan rendah adalah 0-20%.<sup>90</sup> Kemiringan lereng di Desa Surenlor yaitu 15 derajat atau sekitar 30%. Yang mana dijelaskan diatas bahwa kemiringan lereng yang berkisar 21-40% memiliki sensitivitas tingkat kerawanan yang sedang. Pembagian zona kerentanan sangat terkait dengan kondisi kemiringan lereng. Kondisi kemiringan lereng lebih 15° perlu mendapat perhatian terhadap kemungkinan bencana tanah longsor dan tentunya dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mendukung.

---

<sup>90</sup> Agus Sriyono, *identifikasi kawasan rawan bencana longsor kecamatan banyubiru, kabupaten semarang*. Jurusan geografi fakultas ilmu sosial universitas negeri semarang tahun 2012. Skripsi, hal. 10









hanya kepada laki-laki. Diantara ratusan perempuan mungkin hanya 10% darinya yang mampu mempertahankan diri. Apalagi kelompok orang-orang lanjut usia. Yang mana tenaga mereka sudah berkurang. Bahkan banyak dari mereka yang hidupnya sangat bergantung dengan orang lain. Apalagi jika tiba-tiba bencana datang dan menimpa mereka. Mereka yang belum pernah mendapat pengetahuan sama sekali tentang menyelamatkan diri ketika menghadapi bencana akan menghadapi kepanikan dan mereka akan lebih memilih untuk memasrahkan dirinya kepada yang kuasa. Jika dilihat dari jumlah penduduk Desa Surenlor, jumlah penduduk perempuan menempati posisi yang hampir setara dari jumlah penduduk laki-laki yaitu sebesar 1.445 jiwa, sedangkan jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.617 jiwa. jadi kelompok rentan yang ada di Desa Surenlor bisa dibilang cukup tinggi.

Kerentanan suatu desa terhadap bencana tidak hanya dilihat dari aspek jumlah kelompok rentannya saja. Tetapi aspek kerentanan (vulnerability) bisa dilihat dari beberapa aspek yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Diantaranya yaitu:

- **Kerentanan Fisik**

Secara fisik bentuk kerentanan yang dimiliki masyarakat berupa daya tahan masyarakat dalam menghadapi bahaya tertentu, misalnya: kekuatan bangunan rumah bagi masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Seperti rumah yang tahan gempa bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi. Sedangkan kerentanan fisik bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan bencana tanah longsor yaitu apakah bangunan tersebut









kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yaitu adanya trauma. Jadi walaupun tidak ada korban jiwa, tetapi mengancam kehidupan manusia, merugikan perekonomian, kerusakan infrastruktur dan timbulnya penyakit juga termasuk bencana. pemahaman tersebut sebaiknya perlu diperbaharui.

Selama ini paradigma masyarakat terhadap bencana masih pada paradigma yang responsif bukan pada paradigma preventif. Dengan mengadopsi “*Hyogo Framework for Action (HFA)*” atau kerangka hyogo untuk Aksi dalam pengurangan bencana, pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Maret 2007 menetapkan Undang-undang tentang Penanggulangan Bencana No. 24 tahun 2007. Undang-undang ini telah merubah paradigma dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana, dari reaktif/responsif menjadi pro-aktif/preventif, dari terpusat menjadi terdesentralisasi dan dari pemerintah semata menjadi peran seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya, Undang-undang baru ini memberikan perlindungan sebagai bagian dari hak dasar rakyat dan mendorong orang untuk mengambil peran aktif dalam menentukan keamanan mereka dalam mengatasi bencana. Sementara itu, pemerintah memainkan peran sebagai pembawa kewajiban terhadap hak-hak rakyat dalam memenuhi hak-hak rakyat dalam perlindungan penanganan bencana melalui pembagian tanggungjawab dengan para pemangku kepentingan lainnya.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Panduan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, *making aceh safer through disaster risk reduction in development*, UNDP 2012 dalam Lassa, “*The Rise of Risk – Where is the Resilience.*”, 2008

Dalam merubah paradigma masyarakat dari responsif menjadi preventif bukan hanya tanggung jawab individu saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab komunitas. Tetapi kadang tanggung jawab ini disalah kaprahkan oleh masyarakat. Terkadang jika ada komunitas yang peduli terhadap bencana, sikap ketergantungan masyarakat semakin menjadi. Perspektif mereka bahwa akan ada yang membantu dari segi materi ketika bencana terjadi menjadikan masyarakat bergantung (*jagakno*). Bahkan sering kali jika ada pendataan terkait dengan siapa saja korban yang terkena bencana masyarakat lebih sering bertanya nanti dapat apa pak/buk? Nanti dapat apa mbak/mas?. Seperti yang diungkapkan oleh Damis (45) yang menyatakan bahwa korban yang terkena longsor di Desa Surenlor itu jarang sekali di data. Aparat desa mendapatkan data korban-korban longsor hanya dari ketua RT. Karena setiap kali jika masyarakat yang terkena korban longsor itu di data dengan mendatangi rumah mereka, mereka selalu bertanya nanti dapat apa? Karena paradigma masyarakat sudah terstruktur bahwa jika di data pasti akan mendapatkan bantuan. Sedangkan dari desa sendiri ketika mendata korban longsor, belum tentu desa akan memberikan bantuan.

Hal ini memang bukan salah dari masyarakat yang berfikir seperti itu. karena selama ini, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pendekatan yang *Top down* yang cenderung menjadikan masyarakat lebih bergantung dari pada berusaha secara mandiri. masyarakat lebih sering menerima bantuan berupa materi. Baik itu dalam kesejahteraan sosial maupun dalam aspek pengembangan ekonomi rumah tangga. Seperti BLT (bantuan Langsung Tunai) yang mana diberikan langsung oleh pemerintah kepada masyarakat yang tidak

mampu. Dan seringkali tidak tepat sasaran. Dampaknya adalah masyarakat juga semakin bergantung kepada pemerintah. Seharusnya pendekatan yang dilakukan pemerintah yaitu pendekatan *bottom up* sehingga bisa tepat sasaran.

Dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk merubah paradigma masyarakat. apalagi jika masyarakat sudah berada pada zona nyamannya. Walaupun paradigma yang mereka anut itu belum tepat, tetapi masyarakat sudah merasa nyaman. Maka masyarakat akan mempertahankan kenyamanannya.

### 3. Kesadaran Masyarakat

Kemiskinan akan cenderung memaksa orang untuk tinggal di tempat yang tidak aman atau berbahaya. Di sadari atau tidak, mereka akan tetap tinggal di daerah yang berbahaya. Mereka bisa saja melakukan kegiatan pemenuhan ekonomi dengan tindakan yang bisa saja merusak lingkungan. Ancaman dan risiko bencana bisa saja timbul akibat aktifitas ini, sedangkan belum ada tindakan preventif dan pemulihan dalam upaya mengurangi risiko bencana. Tidak hanya itu, pemanasan global juga dapat memicu adanya kejadian bencana. Adanya perubahan budaya, gaya hidup, dan perilaku komunitas cenderung mengeksploitasi sumber daya alam. Dan secara tidak sadar bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Budaya sadar akan bencana belum sepenuhnya melekat pada masyarakat Desa Surenlor. Karena masyarakat yang sadar akan kemungkinan terjadinya bencana masih sangat rendah. Adanya ungkapan bahwa “bencana bisa menimpa siapa saja, kapan saja dan dimana saja” tidak membuat masyarakat Desa Surenlor menjadi takut atau gelisah. Kesadaran akan timbulnya bencana kapan saja masih

belum buming atau meluas di masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang tidak peduli terhadap adanya bencana. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan kerentanan bencana longsor. Masyarakat masih berada pada zona nyaman mereka. Mereka masih berfikir bahwa bencana tidak akan menimpa mereka, dan jangan sampai menimpa mereka. Dari sinilah, jika ditanya tentang bagaimana sikap kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, masyarakat masih belum mempersiapkan apapun. Selain itu, belum ada upaya-upaya untuk mencegah terjadinya longsor.

Selama ini, pemerintah hanya menggiatkan pembangunan ekonomi saja. Sehingga issue akan budaya sadar bencana belum mengena dan tersentuh di masyarakat. Seringkali dana-dana APBD hanya digiatkan pada perkembangan pembangunan saja. Sehingga tidak ada sosialisasi dari aparat desa berkenaan dengan issue bencana. Masyarakat Desa Surenlor ibaratnya seperti orang yang tertidur ketika memperoleh informasi tentang bencana. jadi, selama belum ada seseorang atau komunitas yang membangunkan masyarakat dari tidur panjangnya, maka informasi tentang budaya akan sadar bencana tidak akan pernah disentuh atau dijamah masyarakat. Sehingga tidak heran jika masyarakat masih bersifat apatis terhadap adanya bencana. selama mereka tidak mengalami bencana secara langsung maka mereka tetap berada pada tidur nyamannya.

Bebas dari risiko bencana hanyalah sebuah utopia. Bencana adalah risiko yang gagal ditangani. Karena seringkali sosialisasi terkait bencana hanya sampai pada masyarakat tinggi saja. Rakyat kecil yang justru membutuhkan pengetahuan dan sosialisasi akan bencana lebih sering terabaikan. Program pemerintah selama

ini, hanya pada sampai partisipasi masyarakat terhadap program saja. Tidak peduli siapa saja yang mengikuti partisipasi tersebut dan sering kali tidak tepat sasaran. Bencana tidak pernah datang secara tiba-tiba. Gempa bumi bisa saja tiba-tiba terjadi, tetapi jarak antara gempa bumi dan bencana cukup panjang. Banjir dan tanah longsor bukan bencana yang bisa datang secara tiba-tiba, tetapi justru diperlukan proses yang panjang dan bukan karena faktor hujan semata. Politik dan kekuasaanlah yang membuat bencana menjadi tiba-tiba. Maksudnya yaitu, bahwa ketidak siapan politik dalam manage bencana, maka bencana akan selamanya dilihat sebagai “tiba-tiba”.

Di Desa Surenlor belum pernah ada pelatihan atau kampanye tentang kesiapsiagaan bencana. Jika masyarakat ditanya tentang bencana, masyarakat hanya berbicara pasrah, bahwa bencana itu datangnya dari kehendak Tuhan. Bencana bukanlah hal yang harus diutamakan. Karena memang dampak dari bencana tanah longsor belum terlihat. Masyarakat lebih tertarik pada isu perkembangan ekonomi saja. Jika ditanya tentang kesiapan masyarakat tentang bencana, maka mereka banyak yang menjawab belum siap dan jangan sampai terjadi bencana. Karena sistem manajemen dan kesiapsiagaan masyarakat belum terbangun.

Masyarakat tidak pernah mendapatkan pendidikan atau sosialisasi terkait dengan isu bencana. Mereka mendapatkan pengetahuan tentang mitigasi bencana dari nenek moyang mereka. Mereka hanya melakukan atau mencontoh apa yang sudah dilakukan nenek moyang ketika bencana menimpa mereka. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Dakun selaku ketua RT 04.





Dari hasil wawancara diatas, terlihat sekali bahwa masyarakat masih sangat percaya pada takdir. Anggapan inilah yang menjadikan kurangnya respon dan partisipasi masyarakat. Sehingga untuk kesiapsiagaan dan mitigasi cenderung terabaikan. Karena anggapan tersebut, menjadikan masyarakat lebih agamis, sehingga menganggap semua yang terjadi adalah takdir dari yang maha kuasa. Sehingga masyarakat tidak sadar bahwa wilayah tempat tinggal mereka semakin rawan terhadap bencana. karena belum ada langkah kesiapsiagaan mau mitigasi sama sekali. Terbaikannya Pengurangan Risiko Bencana oleh masyarakat menjadikan masyarakat tidak peduli terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Kesibukan masyarakat seperti ngeramban dan garap sawah menyebabkan masyarakat enggan untuk melihat kondisi lingkungan di sekitarnya. Semua waktunya dihabiskan untuk ngeramban dan garap sawah. Pagi, siang, sore baik laki-laki atau perempuan seolah-olah mereka menjadi budak dari ternak sapinya. Karena setiap harinya, itulah yang mereka lakukan.. Sehingga isu kerusakan lingkungan atau isu tentang bencana sudah hampir mereka abaikan. Selama mereka berada pada zona nyaman, mereka tetap tidak akan mengubah paradigma masyarakat yang mengatakan bahwa bencana adalah memang takdir dari Allah SWT. Karena hubungan sosial masyarakat yang sudah terstruktur menjadikan masyarakat semakin nyaman dengan kehidupannya.

Tidak hanya itu, belum ada pengorganisasian dari masyarakat maupun dari pihak aparat desa mengenai upaya pengurangan risiko bencana menyebabkan pengetahuan masyarakat sangat awam terhadap bencana. Masyarakat masih belum faham dan belum tahu apa saja yang harus dilakukan. Mengapa perlu

dilakukan pengurangan risiko bencana dan bagaimana upaya pencegahannya. Tanpa adanya *local leader*, maka pemikiran masyarakat masih tertutup. Yaitu masyarakat hanya akan berada pada zona nyaman. Sehingga adanya pengorganisasian atau *local leader* dalam upaya pengurangan risiko bencana menjadi hal yang sangat penting.

Sementara itu, adanya kelompok masyarakat tangguh akan bencana menjadi salah satu indikator yang merupakan desa tangguh bencana. Sementara di Desa Surenlor belum ada kelompok masyarakat tangguh bencana. Yang mana kelompok ini akan menjadi pusat data-data bencana yang ada di Desa.

#### C. Perspektif Pemangku Kebijakan Terhadap Isu Bencana

Selama ini, perspektif pemangku kebijakan terhadap isu kebencanaan sangatlah diabaikan. Dari perspektif pemerintah desa sendiri belum ada peraturan tentang penanggulangan maupun pengurangan risiko bencana. Selama ini, pemerintah desa hanya berfokus pada isu pengembangan ekonomi dan perbaikan infrastruktur saja. Isu kebencanaan hampir tidak tersentuh. Dilihat dari peraturan desa, isu bencana tidak pernah dijamah. Apalagi penganggaran dana untuk bencana. Selama ini, anggaran dana untuk bencana hanya diambilkan dari dana lain-lain. Aparat desa cenderung tidak peduli terhadap isu kebencanaan. Bahkan selama ini, korban bencana hanya diberikan bantuan yang seadanya saja, tanpa harus melakukan perubahan agar menjadi yang lebih baik.